

Ideologi Anti-Barat dan Musik Ngak-Ngik-Ngok: Politik Kebudayaan dan Regulasi Musik Era Soekarno

Derta Arjaya¹, Hervina Nurullita^{2*}, Hendra Afiyanto³

¹Program Studi Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosiohumaniora Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi

Jl. Ikan Tongkol No.22, Kertosari, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur - Indonesia

³Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah,

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur - Indonesia

*Penulis korespondensi: hervina.nurullita@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v10i2.46768>

Diterima/ *Received*: 12 Juni 2022; Direvisi/ *Revised*: 31 Januari 2026; Disetujui/ *Accepted*: 1 Februari 2026

Abstract

This study examines Soekarno's perspective on Western influences during the 1950s–1960s and its impact on the development of music in Indonesia. The study addresses two main questions: first, how did Soekarno view the West during his presidency; and second, how did this view affect the trajectory of Indonesian music? Employing the historical method, the research integrates heuristics, source criticism, interpretation, and historiography to analyze primary and secondary sources. The findings reveal that Soekarno perceived the West as a political and cultural threat, frequently labeling it as “Nekolim” (neo-colonialism and imperialism). He viewed Western music not merely as a foreign art form but as a vehicle of cultural domination that undermined the revolutionary ideals and national identity of Indonesia. As a result, Western-influenced music was subject to prohibition, exemplified by the banning of the ngak-ngik-ngok music, which was considered detrimental to Indonesian cultural values. Soekarno promoted policies aimed at fostering music that aligned with nationalist and revolutionary principles, thereby restricting the development and performance of Western styles within the country. This study concludes that Soekarno's ideological stance significantly shaped the evolution of Indonesian music during his era. By enforcing cultural policies rooted in nationalism, he directly influenced which musical forms could flourish, emphasizing the creation and preservation of a distinctly Indonesian musical identity.

Keywords: Ngak-Ngik-Ngok; Cultural Policy; Political Ideology; Soekarno; Music; Anti-Western.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan Soekarno terhadap pengaruh Barat pada era 1950–1960-an serta dampaknya terhadap perkembangan musik di Indonesia. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana Soekarno memandang Barat selama masa kepresidenannya; kedua, bagaimana pandangan tersebut memengaruhi arah perkembangan musik Indonesia. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini mengintegrasikan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk menganalisis sumber primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soekarno memandang Barat sebagai ancaman politik dan budaya, yang sering ia sebut sebagai “Nekolim” (neo-kolonialisme dan imperialisme). Ia menilai musik Barat bukan sekadar bentuk seni asing, tetapi sebagai sarana dominasi budaya yang dapat merusak cita-cita revolusi dan identitas nasional Indonesia. Akibatnya, musik yang dipengaruhi Barat dilarang, salah satunya musik ngak-ngik-ngok yang dianggap merusak nilai budaya Indonesia. Soekarno mendorong kebijakan yang memajukan musik sesuai dengan prinsip nasionalis dan revolusioner, sehingga membatasi perkembangan dan pertunjukan musik Barat di dalam negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan ideologis Soekarno memiliki pengaruh signifikan terhadap evolusi musik Indonesia pada masanya. Dengan menerapkan kebijakan budaya yang berlandaskan nasionalisme, ia secara langsung menentukan bentuk musik yang dapat berkembang, menekankan penciptaan dan pelestarian identitas musik Indonesia yang khas.

Kata Kunci: Ngak-Ngik-Ngok; Politik Kebudayaan; Ideologi Politik; Soekarno; Musik; Anti-Barat.

Pendahuluan

Perkembangan musik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun pada tataran global. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang kemudian memunculkan persaingan pengaruh ideologi. Pertarungan antara komunisme dan liberalisme tersebut turut membentuk iklim politik internasional yang berdampak pada arah kebijakan dan ekspresi kebudayaan, termasuk di Indonesia.

Dampak persaingan ideologi antara komunisme dan liberalisme di Indonesia sangat terasa terutama pada periode pertama pasca pengakuan kedaulatan (1950-1959), Indonesia pada saat itu menjalankan sistem demokrasi parlementer, yang menurut presiden Soekarno justru semakin memperburuk keadaan Indonesia. Ia akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden yang didukung oleh ABRI pada 1959. Sejak dikeluarkan dekrit tersebut, Presiden Soekarno menjadi dalang dari segala arah kebijakan Indonesia. Kekuasaan presiden Soekarno yang dominan membuat segala perkataannya sebagai hukum yang harus dijalankan. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang kuat terhadapnya (Kahin 2013, 213-14). Bahkan dalam pengantar bukunya *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Dahm mengatakan bahwa sampai dengan awal 1965 Soekarno masih menguasai gelanggang politik Indonesia yang paling tidak ditunjukkan dengan gelar-gelar resminya “Presiden Seumur Hidup”, “Pemimpin Besar Revolusi Indonesia” dan yang terakhir, -meskipun sering kali tidak dapat dikendalikan, yaitu sebagai “Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata” (Dahm 1987, 37). Selanjutnya, ketika berkuasa penuh Soekarno menerapkan berbagai kebijakan yang mencerminkan pandangannya terhadap dunia Barat, di antaranya mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB dan menolak bantuan dari luar negeri.

Ada beberapa kajian pustaka tentang pelarangan musik ngak-ngik-ngok oleh Presiden Soekarno, diantaranya adalah Pratiwi dan Nasution (2014). Pratiwi dan Nasution menjelaskan hubungan presiden Soekarno dengan

negara-negara Barat terjalin dengan baik, namun kondisi tersebut tidak sejalan dalam bidang seni. Pada tahun 1960-an saat musik-musik Barat mulai masuk ke Indonesia dan digemari oleh anak muda Indonesia, Presiden Soekarno justru melarangnya. Hal ini berkaitan dengan Manifesto Politik Indonesia yang diputuskan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tanggal 10 November-7 Desember 1960. Dalam sidang ini Soekarno menegaskan pemberantasan kolonialisme dan imperialisme salah satunya adalah pelarangan music Barat di Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dalam pidatonya dengan terang menyebut agar pemuda di Indonesia tidak memainkan music berbau Barat; *rock and roll, dansi-dansian ala cha-cha-cha* dan music ala *ngak-ngik-ngok* (Pratiwi dan Nasution 2014, 338).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fauzanafi (2024). Artikel Fauzanafi mengkaji music *ngak-ngik-ngok, cengeng* dan *ambyar* sebagai praktik afektif yang membentuk relasi politik dan sosial di Indonesia. Artikel ini menekankan pada praktik bunyi, pengalaman sonic dan praktik mendengarkan dari masyarakat. Selanjutnya artikel dari Farram (2014). Artikel ini menjelaskan lagu-lagu populer Indonesia pada masa Konfrontasi Indonesia–Malaysia (1963–1966) sebagai medium ekspresi politik dan arena negosiasi antara ideologi negara, kepentingan seniman, serta respons publik. Dengan menelaah lirik, konteks produksi, dan popularitas lebih dari lima puluh lagu bertema Konfrontasi, Farram menunjukkan bahwa musik populer berfungsi tidak hanya sebagai alat propaganda rezim Soekarno yang sarat wacana anti-imperialisme dan anti-nekolim, tetapi juga sebagai ruang artikulasi makna sosial yang lebih kompleks. Artikel Ali (2019) membahas posisi musik dalam pergulatan ideologi pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya dalam ketegangan antara ideologi negara berbasis Nasakom dan ideologi pasar yang berorientasi hiburan. Dengan menggunakan kerangka teoretis hubungan seni dan ideologi serta seni dan identitas, artikel ini menunjukkan bahwa musik pada era Soekarno tidak pernah berada dalam ruang netral, melainkan menjadi arena politik kebudayaan yang sarat kepentingan ideologis.

Dari semua penelitian yang pernah diteliti, penelitian ini mengisi kekosongan regulasi music pada era pemerintahan presiden Soekarno. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pandangan Soekarno terhadap dunia Barat, khususnya Amerika dan Inggris selama periode kekuasaannya? Kedua, apakah pandangan Soekarno tersebut memiliki dampak terhadap perkembangan musik di Indonesia?

Metode

Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi arsip, majalah dan surat kabar sezaman, serta buku dan karya ilmiah yang tersebar di berbagai lembaga, antara lain Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Jogja Library Centre (JLC), kantor Kompas Yogyakarta, Perpustakaan Ignatius Yogyakarta, dan Galeri Malang Bernyanyi.

Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yang mencakup kritik eksternal dan internal untuk menilai keaslian, kredibilitas, serta relevansi sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Setelah itu, dilakukan tahap interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh agar dapat dipahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa penelitian. Tahap akhir adalah historiografi, yakni penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan analitis.

Sumber utama dan paling penting dalam penelitian ini berasal dari surat kabar *Kompas* yang terbit sezaman dengan peristiwa yang dikaji. Berita-berita dalam *Kompas* digunakan secara primer karena memberikan gambaran langsung mengenai respons pemerintah, wacana publik, serta dinamika sosial terkait pelarangan musik ngak-ngik-ngok oleh Soekarno. Dengan demikian, koran Kompas menjadi pijakan utama dalam menganalisis kebijakan kebudayaan dan sikap negara terhadap musik populer pada masa tersebut.

Deskripsi dan Kategori Musik Ngak-ngik-ngok

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ngak-ngik-ngok diartikan sebagai hingar-bingar yang berhubungan dengan music. Istilah ini digunakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959 untuk menandai jenis musik yang dianggap merusak nilai-nilai budaya dan identitas bangsa. Soekarno menyatakan bahwa musik ngak-ngik-ngok merupakan bagian dari imperialisme yang harus diberantas (Pratiwi dan Nasution 2014, 338). Dalam konteks era tersebut, musik ngak-ngik-ngok merujuk pada musik rock, yang mulai memasuki Indonesia pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Musik rock sendiri merupakan salah satu genre yang memberi warna signifikan dalam perkembangan industri musik Indonesia. Namun, sejak awal kemunculannya, genre ini menghadapi berbagai penolakan, terutama dari pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan semangat revolusi dan merusak karakter bangsa (Hidayat 2018, 13).

Penolakan terhadap musik Barat, termasuk musik rock, tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga tercermin dalam tindakan simbolik. Fauzanafi (2014, 138) menunjukkan sebuah foto yang menampilkan Soekarno menutup telinga ketika dua orang berkulit putih memainkan musik di belakangnya. Foto tersebut diambil saat Soekarno melakukan lawatan ke Athena pada 9 Juli 1965. Dengan foto itu menunjukkan bahwa sikap simbolik Soekarno terhadap pengaruh budaya Barat yang dianggap dapat mengikis nilai-nilai nasional dan budaya lokal.

Kebijakan dan pandangan Soekarno terhadap musik ngak-ngik-ngok mencerminkan hubungan antara politik, budaya, dan identitas nasional. Musik yang berasal dari Barat, terutama rock, dipersepsikan sebagai alat imperialisme budaya yang bertentangan dengan tujuan nasionalisme. Penolakan ini kemudian memengaruhi arah perkembangan musik Indonesia, mendorong lahirnya karya-karya musik yang menekankan identitas nasional dan mengutamakan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, istilah ngak-ngik-ngok tidak hanya menggambarkan genre musik, tetapi juga menjadi simbol resistensi terhadap pengaruh budaya asing dan upaya pelestarian budaya Indonesia.

Pandangan Soekarno terhadap Dunia Barat

Soekarno sebagai sosok yang terkenal anti imperialisme, dalam suatu kesempatan di depan Dewan Keamanan PBB 1961 menyampaikan sikapnya. Dalam pidatonya, Soekarno menempatkan imperialisme sebagai ancaman utama bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang memiliki pengalaman historis sebagai wilayah jajahan. Ia menegaskan bahwa penderitaan akibat kekuasaan kolonial membentuk kesadaran kolektif tentang bahaya imperialisme yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga licik dan ulet. Berdasarkan pengalaman historis Indonesia sebagai bangsa terjajah, Soekarno memandang bahwa meskipun imperialisme secara formal telah melemah pasca-Perang Dunia II, kekuatan tersebut belum sepenuhnya lenyap. Sebaliknya, imperialisme pascakolonial justru hadir dalam bentuk yang lebih berbahaya dan berkelanjutan, sehingga terus mengancam proses dekolonisasi dan kedaulatan negara-negara baru merdeka. (Pedoman untuk Melaksanakan Penderitaan Rakyat 1961, 3017).

Pidato di atas dengan sangat jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana pandangan presiden Soekarno terhadap imperialisme. Selain itu, dari pidato tersebut dan ketika pidato tersebut diucapkan, kita dapat menduga bahwa yang dimaksud oleh Soekarno sebagai imperlisme adalah sebuah upaya untuk menciptakan negara Federasi Malaysia oleh Inggris. Terkait dengan hubungan Indonesia dengan Malaysia tersebut, Sunarti yang melakukan penelitian terhadap hubungan keduanya pada kurun waktu 1957-1976 menyimpulkan bahwa hubungan keduanya yang buruk disebabkan oleh karakter pemimpin kedua belah pihak yang sangat berbeda (Sunarti 2014, 67).

Selanjutnya, pidato presiden Soekarno di depan Dewan Keamanan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif”. Tujuan awal politik luar negeri semacam itu jelas untuk menciptakan suatu dunia yang damai.

Selain menerapkan politik luar negeri yang “bebas dan aktif”, Indonesia juga merilis suatu kebijakan politik “non-blok” atau “tidak memihak” Blok Barat (diwakili oleh Amerika) maupun Blok

Timur (diwakili oleh Uni Soviet dan RRC) yang sedang berusaha meluaskan pengaruhnya masing-masing. Meskipun mewacanakan dan digembargemborkan dalam buku sejarah untuk siswa sekolah – politik Indonesia bersifat “bebas aktif”, namun dalam kenyataannya kecondongan ke arah salah satu blok tidak dapat dihindarkan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Indonesia waktu itu masih tergolong sebagai negara yang baru merdeka, sehingga kecondongan politik semacam itu sangat sulit – kalau tidak mau dikatakan tidak mungkin sama sekali – untuk dihindarkan. Hal tersebut paling tidak tampak dengan sangat jelas sebagaimana disebutkan oleh Wardaya yang mengatakan bahwa kecenderungan Indonesia ke arah blok komunis, membuatnya memperoleh dana yang sangat besar dari Uni Soviet (Wardaya 2001, 204). Kecenderungan ke blok kiri tersebut jelas mengandung konsekuensi, Indonesia semakin jauh dari dunia Barat dan bahkan anti terhadapnya.

Regulasi Musik Era Soekarno

Pada awal 1960'an, negara mulai menunjukkan perhatian serius terhadap arah perkembangan musik nasional sebagai bagian dari proyek pembentukan kepribadian bangsa. Dalam konteks tersebut, Menteri Penerangan Achmadi menyampaikan bahwa Departemen Penerangan merencanakan penyelenggaraan Musyawarah Musik Nasional guna menetapkan norma-norma nasional dalam lagu dan musik Indonesia. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran pemerintah terhadap maraknya karya musik yang secara lirik menampilkan identitas Indonesia, namun masih mengadopsi irama, gaya musikal, dan cara pembawaan yang kuat dipengaruhi unsur-unsur Barat. Oleh karena itu, Musyawarah Musik Nasional diposisikan sebagai langkah strategis untuk mengarahkan musik Indonesia agar berkembang sejalan dengan gagasan kepribadian nasional dan agenda kebudayaan negara pada masa Orde Lama (*Musjawarah Musik Nasional* 1965).

Sikap presiden Soekarno yang anti-Barat tersebut juga berimbas pada bidang kebudayaan. Salah satu imbas tersebut adalah dengan dikeluarkannya manifestasi kebudayaan nasional pada 17 Agustus 1959. Manifestasi kebudayaan

tersebut diwujudkan secara kongkret dengan dikeluarkannya penggolongan jenis musik oleh RRI. Radio pemerintah tersebut kemudian mengkategorikan musik yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia sebagai musik yang dapat “merusak kepribadian bangsa”. Musik yang dimaksud tersebut antara lain: pertama, *drive rhythm* musik, yaitu musik dengan irama ‘kegila-gilaan’ yang menimbulkan “perasaan liar”, ‘tidak terkendali’. Kedua, lagu-lagu dengan pembawaan secara “tidak wajar” seperti suara menangis atau berteriak-teriak. Ketiga, *musik sex dream*, yang bermaksud menyatakan birahi secara sentimental. Keempat, musik dengan gabuhan yang menyimpang dari maksud dan isi aslinya. Kelima, musik dengan teks yang tidak sehat dan tidak membangun. Keenam, siaran musik untuk anak-anak, tetapi ternyata untuk orang dewasa. Larangan terhadap musik yang memiliki kriteria tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Penpres nomor 11 tahun 1963 yang melarang peredaran musik Barat, terutama rock yang berasal dari Amerika dan Inggris (*RRI Menentukan Sikap: Tidak Boleh* 1963; *Tjiri-tjiri Musik yang Dilarang* 1965; *Hetty Koes Endang Juara Festival Pop* 1977; Pamoedji 1985).

Selanjutnya, guna menindaklanjuti Penpres tersebut, maka dibentuklah Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang kemudian menutup *American Motion Picture Association* (AMPAI) (Sasongko 2006, 17). Lembaga yang diketuai oleh Ny. RHA Hidayat tersebut kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis, terhadap hiburan yang berbau Barat. Karena tindakan-tindakan anarkis tersebut, Danujaya menyebutnya sebagai masa kegelapan bagi dunia film dan bioskop Indonesia (Danujaya 1992, 67).

Sebelum adanya pelarangan terhadap musik-musik dari Barat secara tegas menjelang awal tahun 1960’an, di Indonesia musik Barat telah memiliki penggemar tersendiri. Perkembangan musik di Indonesia pada 1950’an secara umum memperlihatkan bangkitnya musik hiburan Barat. Bangkitnya musik hiburan Barat ini tidak terlepas dari peran media yang waktu itu ada di Indonesia. Firman Lubis (Lubis 2008, 196), seorang mahasiswa Kedokteran UI tahun 60’an, menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

“Sebagai orang muda, hiburan bagi kami adalah mendengarkan musik. Biasanya melalui siaran radio. Sialnya, waktu itu hanya ada satu stasiun pemancar dalam negeri, yaitu RRI. Siaran radio swasta atau komersial belum ada pada zaman itu. alternatif yang lain adalah mendengarkan siaran radio luar negeri. Biasanya Radio Australia, BBC, VOA (*Voice of America*) atau Radio Hilversum dari Belanda. Suaranya tidak bagus, banyak kresék-kreséknya, tetapi cukup lumayan untuk didengarkan.

Pada zaman Orla, RRI jarang sekali memutar lagu-lagu Barat atau Amerika. Tentu ini terkait dengan politik anti-Barat. Padahal sejak 1950’an, banyak remaja Jakarta yang menyenangi musik Barat. Penyanyi-penyanyi pop Amerika seperti Elvis Presley, Coonie Francis, The Everly Brothers, Pat Boone, Ricky Nelson dan lain-lain sangat digemari oleh remaja hingga tahun 1960’an. Pada awal tahun 1960-an itu rombongan musik The Beatles dari Inggris muncul dan digandrungi kaum muda di seantaro dunia. Namun lagu-lagunya tidak boleh diputar di RRI. Oleh Bung Karno disebut sebagai musik “ngak ngik ngok”.

Media hiburan yang ada pada era 60’an masih sangat terbatas, yaitu hanya berupa radio milik pemerintah (RRI), dan juga TVRI yang muncul pada 1962, yang banyak menyiarkan lagu-lagu nasional dan radio milik AURI yang banyak didengar karena sering memutar lagu-lagu Barat. Lagu-lagu Barat tersebut seringkali berasal dari piringan hitam baik koleksi AURI maupun koleksi pribadi anggota AURI. Penyanyi Barat yang paling populer pada masa ini antara lain Bing Crosby, Perry Como, Dorris Day dan Johnny Ray. Dalam tahun 1955 masuklah film *Rock Around the Clock* yang dibintangi oleh Bill Haley dari *The Comets* yang kemudian diikuti pula oleh Elvis Presley (Sasongko dan Katjasungkana 1991, 49). Lewat piringan hitam lagu-lagu mereka masuk ke Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas, hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Pada periode 1960-an, musik *rock n’ roll* yang telah memiliki penggemar di Indonesia tersebut semakin diperkuat oleh lagu-lagu dari grup rock Inggris yaitu *The Beatles* dan *The Shadow* (Sasongko dan Katjasungkana 1991, 49). Kegemaran anak-anak muda terhadap musik-musik dari Barat pada era ini

dapat terlihat dari acara-acara musik yang diselenggarakan oleh RRI.

RRI yang sejak 1951 menyelenggarakan sebuah acara Bintang Pilihan dan mendaulat Norma Sanger dengan lagunya “Si Penjaga Sapi”, Ade Tieoalu, Mien Sendakh, Sam Saimun dan Bing Slamet sebagai penyanyi terbaik. Menurut Jabo dan Piper, dalam lagu “Si Penjaga Sapi” tersebut sangat terasa sekali pengaruh dari film *cowboy* Amerika. Begitu pula dengan kekagaguman penyanyi-penyanyi Indonesia yang terpilih melalui acara Bintang Pilihan yang setidaknya diperlihatkan dari nama Bing Slamet yang meniru nama Bing Crosby. Bintang rekaman yang paling top pada masa ini adalah Djuwita yang membawakan lagu ciptaan Maroeti yang berjudul “Indahnya Alam” dan Nur Ain yang menyanyikan lagu “Burung Nuri” karya A.Chalik yang diiringi oleh orkes Melayu Bukit Siguntang. Lagu-lagu tersebut waktu itu telah berhasil terjual oleh Irama Record dalam bentuk Piringan Hitam (LP) di atas 5.000 *copy* (Piper dan Jabo 1987, 10).

Lagu-lagu musisi pop Barat (Inggris dan Amerika) seperti Bing Crosby, Jim Reeves dan Pery Como masuk ke Indonesia lewat rekaman-rekaman mereka. Lagu-lagu tersebut banyak digemari penyanyi Indonesia waktu itu. Mereka (penyanyi-penyanyi Indonesia) pada umumnya menyanyikan lagu-lagu pop Barat tersebut dan meniru gaya mereka (Sasongko dan Katjasungkana 1991, 49). Kegemaran anak-anak muda terhadap musik-musik Barat tersebut segera mendapatkan rintangan menjelang periode 50’an, yang menunjukkan bahwa arah kebijakan Soekarno yang semakin ke kiri.

Sejak 1957 kecenderungan politik Indonesia yang anti-Barat mulai terlihat. Kecendrungan tersebut mencapai puncaknya ketika presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang memulai arah baru perkembangan politik Indonesia. Arah politik yang baru ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni musik Indonesia pada periode-periode selanjutnya.

Sejak awal 1950’an kehidupan seni di Indonesia menunjukkan bangkitnya gairah seni musik Barat, maka pengaruh musik, dan juga gaya hidup musisi Barat yang semakin kental dalam dunia musik Indonesia menjadi sasaran dari sikap pemerintah. Pemerintah semakin keras terhadap

musik-musik dari Barat yang dianggap sebagai salah satu bentuk neo-kolonialisme dalam bidang kebudayaan, khususnya musik.

Menjelang akhir 1950’an radio pemerintah di larang memutar lagu-lagu Barat. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan pelarangan terhadap film-film Barat masuk ke Indonesia. Periode 1959, bertepatan dengan periode penerbitan Dekrit Presiden. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada peringatan hari Kemerdekaan Indonesia yang berjudul Manipol Usdek secara terang-terangan mengutuk musik “*ngak ngik ngok rock n’ roll*”. Menanggapi pelarangan tersebut, musisi-musisi penggemar lagu-lagu Barat berpaling pada lagu-lagu daerah namun dengan melakukan perubahan-perubahan pada iramanya hingga menjadi rock ataupun *cha-caha-cha* (Piper dan Jabo 1987, 11).

Lagu-lagu Barat yang masuk ke Indonesia sebelum adanya pelarangan maupun setelah adanya pelarangan tersebut, yang didengarkan melalui siaran radio dalam dan luar negeri, banyak bercerita tentang kisah percintaan dan kesedihan, sehingga hal tersebut berdampak pada tema-tema lagu pop Indonesia. Adapun penyanyi-penyanyi pop yang populer pada 1960-an antara lain Titiek Puspa, Rachmat Kartolo, Lilis Suryani, Yoke Simatupang, Emi Djohan dan Tetty Kadi. Lagu-lagu pop yang pada umumnya mereka bawaan bertemakan tentang kesedihan, sehingga dipandang sebagai lagu-lagu yang bertentangan dengan semangat revolusi. Lagu yang waktu itu sangat menonjolkan kesedihan yang dipandang sebagai lagu “penguras air mata” adalah “Patah Hati” ciptaan Rachmat Kartolo.

Patah Hati

Patah hatiku jadinya, merana berputus asa
Merindukan engkau yang tiada
Terbayang setiap masa

Oh, begini jadinya, kasih memutus cinta
Apakah aku berdosa, aduh!
Derita menanggung rindu

Bila aku terkenang
Akan masa yang silam
Air mata berlinang

Oh, begini jadinya, Kasih memutus cinta
Apakah aku berdosa, aduh!
Derita menanggung rindu

Lagu tersebut dengan sangat jelas memperlihatkan bagaimana suasana lagu (penuh dengan kesedihan). Remy Sylado (Sedyawati dan Damono 1991, 147) menilai perkembangan musik di Indonesia pada periode ini justru menuju ke arah kemunduran mental yang penuh dengan sikap pesimistik. Ia menggambarkan grup-grup musik Indonesia, bahkan yang tampilannya sangar seperti AKA dari Surabaya dan The Rolliés dari Bandung sekalipun tidak terlepas dari sikap pesimistik tersebut. Dengan demikian, dapat dengan mudah dipahami apabila lirik-lirik lagu yang cengeng seperti itu dipandang bertentangan dengan semangat revolusioner yang digagas oleh presiden Soekarno.

Pengaruh musik-musik Barat yang semakin deras terhadap perkembangan musik di Indonesia tentu saja membuat presiden Soekarno gusar. Kegusarannya tersebut dapat kita lihat dalam pidatonya pada hari Senin pukul 08.10 pagi di Istana Merdeka Jakarta, pada 17 Agustus 1959, dengan judul “*Penemuan Kembali Revolusi Kita*”. Soekarno mengkritik sikap sebagian pemuda dan pemuda yang dinilainya belum konsisten dalam menentang imperialisme kebudayaan, meskipun secara terbuka menolak imperialisme ekonomi dan politik. Ia menyoroti masih kuatnya ketertarikan generasi muda terhadap praktik budaya populer Barat, seperti musik *rock’n’roll*, tarian *cha-cha-cha*, musik *ngak-ngik-ngok* serta bentuk hiburan lain yang dianggap mencerminkan imperialisme kultural. Menurut Soekarno, konsumsi produk budaya asing merupakan bagian dari mekanisme imperialisme kebudayaan yang mengancam kedaulatan identitas nasional. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa meskipun negara berkewajiban melindungi dan mendorong perkembangan kebudayaan nasional, generasi muda juga harus berperan aktif dalam menolak pengaruh budaya imperialistik serta berpartisipasi dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional (Soekarno 1961, 420).

Kutipan di atas memperlihatkan pandangan presiden Soekarno terhadap kebudayaan, khususnya musik Barat. Menurut pandangan

presiden Soekarno musik-musik Barat tidak cocok untuk membentuk mental revolusioner pemuda Indonesia. Ia menyebut menyebut musik-musik dari Barat tersebut dengan istilah “ngak ngik ngok”, yang merupakan sebuah bentuk penghinaan. Menurutnya musik-musik dari tersebut merupakan suatu bentuk subversi dari kaum nekolim dalam bidang kebudayaan yang dapat menghambat kepribadian Indonesia (*Pemain Band Ngak Ngik Ngok akan Ditindak* 1965).

Meskipun telah adanya pelarangan terhadap musik-musik Barat di Indonesia, namun tidak berarti musik-musik tersebut tidak lagi diperdengarkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini sebetulnya merupakan dampak dari perkembangan dunia musik sebelum adanya pelarangan terhadap musik dari Barat.

Pelarangan terhadap musik-musik dari Barat tersebut juga diikuti dengan pelarangan terhadap anak-anak muda Indonesia untuk meniru band-band barat tersebut. Hal tersebut misalnya tercermin dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Penertib dan Pembina Kehidupan Musik DCI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Raya yang menyatakan bahwa penyanyi-penyanyi, musisi-musisi dan band-band dianjurkan supaya tidak memakai pakaian-pakaian, rambut-rambut yang bergaya ‘beatles’ dan dalam membawakan gaya permainan supaya juga mengindahkan kesopanan dan kepribadian bangsa Indonesia. TVRI dan RRI juga dilarang memberikan izin kepada band-band yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut (*Dunia Musik Ibukota Ditertibkan* 1966).

Di tengah upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menghambat laju perkembangan musik Barat di Indonesia, dunia hiburan musik panggung periode 1960’an justru telah mulai menggelar festival band yang diikuti oleh berbagai grup musik di berbagai kota. Kelompok-kelompok musik seperti Koes Bersauda (kemudian mengganti namanya menjadi Koes Plus) dan Dara Puspita yang semua personelnnya wanita. Koes Bersaudara yang pada mulanya membawakan lagu-lagu dengan gaya Everly Brothers, Beatles dan kadang-kadang tampil dengan gaya Bee Gees. Grup tersebut membawakan lagu-lagu dan meniru gaya musisi Barat bukan saja karena mereka menyukainya dan merupakan simbol dari “kemoderan”, tetapi juga

karena penonton yang juga terlanjur telah menyukai musik-musik dari barat meminta mereka untuk membawakan musik-musik dari Barat. Bahkan Koes Plus pada tahun 1960'an awal disebut-sebut sebagai "Beatle Jawa" (Lubis 2008, 196). Aksi-aksi nekat semacam itu tentu saja mengandung resiko (Piper dan Jabo 1987, 11; *Koes Bersaudara' Ditindak* 1965).

Tindakan yang diambil terhadap grup musik Koes Plus tidak terlepas dari pandangan Presiden Soekarno memandang bahwa imperialisme selain dapat berwujud ekonomi dan politik, juga dapat berwujud dalam kebudayaan. Ia jelas merasa khawatir terhadap 'bahaya' pengaruh kebudayaan asing yang dipandang dapat merusak 'kebudayaan Indonesia'.

Selanjutnya, sikap tidak senang terhadap musik-musik Barat juga terlihat dari pernyataan Brigdjen Sugandi yang mengatakan bahwa lagu-lagu *beatle*, *rock and roll* dan irama *twist* adalah lagu-lagu yang hampa, kosong isinya dan penuh dengan penipuan serta merongrong kepribadian bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam ceramah musik yang diadakan oleh Yayasan Kebudayaan Nasional, Eka Dharma. Ia juga mengatakan bahwa musik itu harus mengabdikan pada rakyat, dekat kepada rakyat dan untuk rakyat, bukan terpencil dari rakyat. Ia selanjutnya menambahkan bahwa musik semacam *beatle* dan *gila-gilaan* harus diganyang dan siapa yang tidak bertolak kepada revolusi yang berlandaskan kepada amanat penderitaan rakyat di bidang musik, adalah kontra revolusi (*Lagu-lagu Beatle Kotori Revolusi Kita* 1965).

Semangat revolusi dalam segala bidang kehidupan, terutama dalam bidang kesenian pada masa pemerintahan Soekarno juga tercermin dari pembentukan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) pada 17 Agustus 1950. Pendirian lembaga ini pada awalnya merupakan reaksi atas tumbuhnya feodalisme dan neo-kolonialisme pasca kemerdekaan. Namun seiring dengan perkembangan waktu, lembaga ini lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang PKI, sehingga digunakan untuk menyerang seni, termasuk di dalamnya musik Barat atau bergaya Barat yang dipandang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia (*Lekra dan Geger* 1965 2013, 29).

Kepribadian Indonesia sendiri masa kekuasaan Soekarno dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia. Kepribadian Indonesia dipahami sebagai keseluruhan ciri khas bangsa yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain, yang terbentuk melalui proses historis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang waktu. Ciri-ciri tersebut merupakan refleksi dari kehidupan budi bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis serta konteks sosial dan temporal yang menyertainya. Dalam kerangka tersebut, kepribadian bangsa Indonesia dicirikan oleh nilai-nilai seperti semangat gotong royong, kekeluargaan, ketuhanan, kerakyatan, kemanusiaan, keadilan, sikap ramah, serta prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan keberagaman (MPRS dan Departemen Penerangan, Ringkasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Republik Indonesia No. I dan II/ MPRS/1960, 156).

Salah satu upaya menjaga "kemurnian" kebudayaan Indonesia dan menciptakan pemuda-pemuda yang berjiwa revolusioner adalah dengan cara menindak tegas segala hal yang dipandang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia (Koes Bersaudara' Ditindak 1965.). Tindakan tegas yang dilakukan terhadap kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia itu juga diungkapkan oleh Djaksa D.J.L Aruan SH yang juga sekaligus menjabat Kepala Biro Sospol dan merangkap sebagai Kepala Humas Kejaksaan Tinggi Jakarta mengeluarkan larangan terhadap musik ala Beatle. Pemerintah menegaskan bahwa tidak satu pun wilayah Indonesia boleh dimanfaatkan untuk penyebaran praktik musik bergaya Beatles, karena bentuk kebudayaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepribadian bangsa dan berpotensi melemahkan kebudayaan nasional yang tengah tumbuh dalam konteks revolusi. Ditegaskan pula bahwa pembiaran terhadap musisi yang terus mengadopsi gaya musik Beatles dianggap hanya akan menguntungkan kelompok kontra-revolusioner, yang secara berkelanjutan berupaya merongrong dan menghambat jalannya revolusi, termasuk melalui bentuk-bentuk subversi di ranah kebudayaan (*Koes Bersaudara' Ditindak* 1965).

Salah satu cara memberantas apa yang disebut usaha subversi kaum nekolim terutama dalam bidang kebudayaan, khususnya musik adalah dengan dikeluarkannya instruksi wajib daftar bagi semua band/ orkes. Selain band-band, semua *stake holder* yang bergerak dalam bidang *show business* seperti tempat hiburan, organisasi-oraganisasi yang bergerak dalam bidang tari dan musik serta para pengusaha pembuat piringan hitam juga diwajibkan mendaftarkan diri (Wadjib Daftar Bagi Semua Band/Orkes 1965).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kriteria musik yang dilarang, meskipun jelas kriteria tersebut penuh dengan ambivalensi yang terus berlanjut sampai masa rezim Soeharto. Kepala Bagian V Komdak Djaya AKBP Wiratno Puspoatmodjo S.H mengatakan bahwa rumusan seni musik dan Pedoman Dasar yang dihasilkan atas dasar perumusan khusus dari pertemuan yang dihadiri oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, PDK, Ormas-ormas dan Orpol musik lainnya telah tersusun. Dalam rumusan itu sendiri, musik digolongkan menjadi dua, yaitu yang bersifat konstruktif dan destruktif. Jika musik tersebut bersifat konstruktif akan dibina dan dikembangkan, namun jika musik tersebut dipandang destruktif (merusak) maka akan diberantas sampai habis. Adapun ciri-ciri musik yang dilarang adalah sebagai berikut: (1) Musik yang berirama *beat* dan *drive*, sedemikian rupa hingga memberikan rasa tingkah laku yang tak terkendali dan bertentangan dengan rasa kepribadian kita; (2) Musik yang dalam bentuk pernyataan serta pembawaannya menimbulkan nafsu birahi dan asosiasi pikiran yang tidak sopan; (3) Yang dinyanyikan dengan kata-kata yang tidak sopan, tidak sehat atau mengandung kata-kata asmara yang berlebih-lebihan; (4) Musik yang dengan sengaja dinyanyikan dengan pergantian suara yang tidak sewajarnya, seperti suara diparohkan (semacam diserakkan), diteriakkan sebagai nyanyian asing; (4) Musik yang dibawakan dengan tingkah laku, pakaian dan perwujudan lahiriah lain yang dengan sengaja dipergunakan sebagai tiruan mode asing yang bertentangan dengan rasa ke-Indonesia-an; (5) Musik Indonesia yang susunannya, gubahannya serta pembawaannya dilakukan secara *Jazz* maupun *beat*, hingga menyimpang dari keasliannya secara

tidak wajar (*RRI Menentukan Sikap: Tidak Boleh Disiarkan* 1963).

Selanjutnya, sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya, presiden Soekarno memandang bahwa musik itu harus bersifat revolusioner. Dalam harian Kompas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan musik yang revolusioner adalah musik yang mencerminkan aspirasi-aspirasi nasional yang progresif. Oleh karenanya, kebudayaan atau kesenian, diantaranya musik, harus mengabdikan kepada revolusi dan kepada rakyat. Musik yang mengabdikan kepada revolusi dan kepada rakyat misalnya lagu yang diciptakan oleh W. Rudolf Supratman, Cornel Simandjuntak dan Ismail Marzuki. Seperti musik yang mengabdikan pada revolusi dan rakyat antara lain lagu-lagu dan tari-tari kegembiraan/ keriang buruh-buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, lagu-lagu yang mengisahkan rakyat maupun yang mengisahkan tentang kaum tani yang bekerja di sawah dan lain sebagainya. Inti dari semua itu menurut Sukirman musik tersebut harus mengabdikan kepada rakyat dan revolusi (*Supratman, Simandjuntak, Ismail Marzuki* 1965).

Sukirman juga menganggap bahwa piringan hitam merupakan penyebab perkembangan musik di Indonesia sama dengan perkembangan musik di Amerika, oleh karenanya ia menyatakan bahwa piring hitam yang masuk ke Indonesia maupun yang dicetak dalam negeri harus diseleksi. Kesenangan pemerintah dalam hal ini paling tidak dibuktikan dengan dibentuknya Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang kemudian membekukan *American Motion Picture Association* (AMPAI) (Sasongko dan Katjasungkana 1991, 17).

Kebijakan pemerintahan dalam bidang musik ini juga tentu saja didukung oleh RRI (Radio Republik Indonesia) yang notabennya merupakan salah satu instrument kekuasaan pemerintah untuk mendukung berbagai kebijakannya, salah satunya dalam bidang musik. Seperti yang diberitakan Kompas (*Supratman, Simandjuntak, Ismail Marzuki* 1965) bahwa RRI tidak pernah lagi menayangkan musik ngak-ngik-ngok sampai dengan menjelang peristiwa 1965.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan ditindak tegas oleh pihak yang

berwenang. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diintruksikan kepada grup musik supaya mendaftarkan diri di Inspeksi Daerah Kebudayaan DCI Jakarta di Jalan Salemba Raya 18 dan di RRI Jalan Merdeka Barat, Jakarta 4-5. Waktu pendaftaran tersebut dimulai sejak penerbitan berita ini dan batas akhirnya sampai dengan 12 November 1966 (Dunia Musik Ibukota Ditertibkan 1966).

Salah satu contoh tindakan tegas yang diambil pemerintah terhadap musisi yang tidak menaati ketentuan pemerintah adalah penangkapan terhadap pemimpin band Koes Bersaudara. Penangkapan tersebut dikarenakan grup musik ini masih memainkan lagu-lagu *beatle*, walaupun sudah diperingatkan berkali-kali (*Koes Bersaudara' Ditindak* 1965). Menurut Drs. Anwas selaku Assisten II bidang operasi Komdak VII dalam jumpa pers di ruang Kepala Staff Komdak VII/ Djaya tindakah tegas tersebut dijalankan atas perintah Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno (*Pemain Band Ngak Ngik Ngok akan Ditindak* 1965). Presiden Soekarno dalam peringatan HUT GMNI tahun 1965 menyinggung soal penangkapan grup Koes Bersaudara ini, ia mengatakan: "Djangan seperti kawan-kawanmu Kus Bersaudara. Masih banyak lagu Indonesia, kenapa mesti Elvis-Elvisan, ber-*ngak ngik ngok*..." (Suhana 2014, 4).

Intensitas terhadap pelarangan anak-anak muda Indonesia untuk memainkan musik-musik Barat, terutama rock, tidak hanya representasi dari tendensi kebijakan pemerintah yang anti-Barat saja, tetapi juga merupakan representasi dari perkembangan musik Barat di Indonesia itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Theodore, bahwa musik rock meerupakan musik yang sangat digemari pada akhir tahun 1960-an (Theodore 1982).

Apakah dengan tindakan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini diwakili oleh presiden Soekarno tidak senang dengan grup Koes Berasudara? Kasus grup ini memang berbeda. Ternyata, selain untuk menunjukkan sikap pemerintah terhadap jenis-jenis musik dari Barat, pemerintah punya maksud lain dibalik penangkapan terhadap grup musik ini, yaitu mengirimkan mereka ke Malaysia untuk mengetahui sejauh mana sikap orang Indonesia

yang ada di sana dan sikap orang Malaysia sendiri terhadap Indonesia yang sedang gencar-gencarnya mengeluarkan slogan "ganyang Malaysia!", tidak akan dicurigai (Theodore 1982, 5).

Sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia ini memang sangat menarik untuk diperhatikan. Coba perhatikan lagu yang berjudul "Semalam di Malaysia" yang diciptakan oleh Said Effendi berikut.

"Semalam di Malaysia"

Aku pulang dari rantau
Bertahun-tahun di negri orang oh.. Malaya
Oh dimana kawan dulu
Kawan dulu yang sama berjuang oh.. Malaya
Kekasih hatiku kini telah hilang
Hilang tak berpesan aduhai nasib apakah daya
Cinta hampa hati merana... mana dia...

Inilah kisahku semalam di Malaya
Diri rasa sunyi aduhai nasib apakah daya
Aku hanya seorang pengembara... yang hina...

Menurut presiden Soekarno, lagu tersebut sangat berlebihan dalam memuji Malaysia (*RRI Menentukan Sikap: Tidak Boleh Disiarkan* 1963). Padahal kalau kita perhatikan, lagu-lagu tersebut hanyalah ungkapan seorang yang merasa sedih karena harus berpisah dengan seorang kekasih dan sahabat, tidak menunjukkan sedikitpun sikap memuji, seperti yang dikatakan oleh presiden Soekarno. Tuduhan tersebut tidak begitu mengejutkan, karena presiden Soekarno sendiri memang menganggap bahwa pembentukan negara Malaysia merupakan salah satu proyek neo-kolonialisme Barat, sesuatu yang sangat ia benci, sehingga mendengarkan nama Malaysia-pun tampaknya ia sangat sinis.

Kembali ke grup-grup musik yang –menurut presiden Soekarno bergaya *beatle-beatle-an*, mengalami nasib yang serupa dengan yang dialami Koes Plus. Selain grup pimpinan Toni Koeswoyo tersebut, grup musik lain seperti Bharata Band di Surabaya pada 1963 ditangkap karena menyanyikan lagu-lagu The Beatles. Begitu pula dengan Abadi Soesman, ditahan di komando Distrik Militer Malang karena menyanyikan lagu-lagu The Beatles (Mulyadi 2009,12).

Selain tindakan tegas berupa penangkapan dan penyitaan terhadap alat musik band-band “ngak ngik ngok” dan musisi yang bergaya *beatle*, tindakan “melindungi kebudayaan Indonesia” itu juga dilakukan dengan cara melakukan operasi terhadap toko-toko yang masih menjual piringan-piringan hitam lagu-lagu “beatle-beatle-an”. Salah satu operasi tersebut misalnya dilakukan terhadap toko-toko musik di Tasikmalaya, dimana di kota tersebut penjualan piringan hitam lagu-lagu “beatle-beatle-an” terus meningkat (*Operasi Sikat Menjikat Habis* 1965).

Situasi yang demikian tentu saja akan berdampak pada jenis musik yang dapat berkembang di Indonesia. Akibat pelarangan tersebut, anak-anak muda terutama dari kalangan menengah ke atas yang pada umumnya menggemari musik-musik rock maupun pop barat, kemudian berpaling ke lagu-lagu daerah namun membawakannya dengan gaya rock. Selain itu, para produser film menjadi berpaling ke film-film India. Selain restu dari pemerintah, pilihan kepada India juga tidak terlepas dari fakta bahwa India merupakan produser film terbesar di Asia bahkan dunia dengan kapasitas produksi sebesar 500 film per tahun (mengalahkan Amerika yang mampu memproduksi kurang lebih 200 film per tahun), bahkan pada 1979 produksi film India mencapai 557 film per tahun (*FFA ke 26 Harus Dikaji Kembali* 1980).

Pilihan terhadap India ternyata menimbulkan suatu pengaruh terhadap perkembangan orkes Melayu, suatu genre musik yang nantinya lebih dikenal dengan istilah dangdut dan memiliki pola yang mapan. Pengaruh musik India tersebut terutama tampak dalam penggunaan gendang, yang sebelum mendapatkan pengaruh dari India, yang digunakan adalah rebana, dan suling bambu, terutama cara memainkannya. Penyerapan alat musik semacam ini, ditambah lagi cara memainkan alat musik tersebut yang banyak memiliki kesamaan, tentu saja membuat dangdut sangat lekat dengan irama India. Film-film dari India tersebut pada umumnya berupa film musikal, dimana pada masa kepemimpinan presiden Soekarno biasanya diputar pada bioskop-bioskop kelas rakyat. Dengan demikian, logis apabila lagu-lagu Melayu yang telah banyak mendapatkan

pengaruh India juga akrab dengan ‘kalangan bawah’.

Selanjutnya, kita dapat membayangkan konsekuensi dari masuknya film-film India ke Indonesia tersebut. Selain-selain mendominasi hiburan di tanah air, film-film India -yang pada umumnya berupa film musikal- juga berpengaruh terhadap perkembangan musik di tanah air. Pengaruh tersebut sangat terlihat ketika munculnya Elly Khadam yang berasal dari Jakarta. Ia mengembangkan suatu gaya lagu yang ‘setia’ pada produk orkes Melayu dan menciptakan suatu irama dan suara baru; dengan instrument India, Arab dan gendang Indonesia serta suling bambu yang biasanya dipakai dalam film India yang pada masa itu sedang membanjiri Indonesia. Elly Khadam memasukkan suatu dinamisme dan sensualisme yang unik ke dalam musiknya yang kemudian menghasilkan lagu dengan judul *Boneka Cantik dari India* (Simatupang 1966, 63).

Simpulan

Perkembangan musik di Indonesia ternyata tidak pernah terlepas dari perkembangan politik. Keduanya saling berhubungan, artinya perkembangan musik itu dapat mencerminkan perkembangan politik. Pengalaman Soekarno yang hidup di tiga zama (kolonial Belanda, Jepang dan Indonesia merdeka), membuatnya bersikap sinis terhadap dunia Barat yang dianggapnya sebagai negara penjajah. Sikapnya yang anti Barat sangat terlihat terutama dari pidato-pidatonya yang mengecam dunia Barat.

Sikap Soekarno yang anti Barat tersebut ternyata sangat mempengaruhi perkembangan musik di Indonesia. Ia memandang perkembangan musik Barat di Indonesia sebagai bentuk neo-kolonialisme. Akibat dari pandangannya yang demikian, musik-musik dari Barat tidak dapat berkembang di Indonesia.

Referensi

- “Koes Bersaudara’ Ditindak.” 1965. *Kompas*, 3 Juli.
“Dunia Musik Ibukota Ditertibkan.” 1966. *Kompas*, 2 November.

- “FFA ke 26 Harus Dikaji Kembali Tujuan dan Kenyataannya.” 1980. *Kompas*, 8 Juni.
- “Hetty Koes Endang Juara Festival Pop Tingkat Jakarta.” 1977. *Kompas*, 18 Juli.
- “Koes Plus itu Suara Batin.” 2012. *Republika*, 12 September.
- “Lagu-lagu Beatle Kotori Revolusi Kita.” 1965. *Kompas*, 24 Juli.
- “Lekra dan Geger 1965.” 2013. *Tempo*, 30 September–6 Oktober.
- “Musik Ala Beatle Dilarang.” 1965. *Kompas*, 3 Juli.
- “Musjawarah Musik Nasional.” 1965. *Kompas*, 17 Februari.
- “Operasi Sikat Menjikat Habis.” 1965. *Kompas*, 12 Agustus.
- “Pemain Band Ngak Ngik Ngok akan Ditindak.” 1965. *Kompas*, 9 Juli.
- “RRI Menentukan Sikap: Tidak Boleh Disiarkan Lagu-lagu dari Diah Iskandar, Elly Agus, Koes Bersaudara dan Semalam di Malaya.” 1963. *Selecta*, no. 154.
- “Supratman, Simandjuntak, Ismail Marzuki.” 1965. *Kompas*, 24 Juli.
- “Tjiri-tjiri Musik jang Dilarang.” 1965. *Kompas*, 18 Agustus.
- “Wajib Daftar Bagi Semua Band/Orkes.” 1965. *Kompas*, 29 Juli.
- Ali, Arhamuddin. 2019. “Music in Indonesia on the Ideological Debates in the Sukarnoian Era.” *Journal of Music Science, Technology and Industry* 2(1): 23–36.
<https://doi.org/10.31091/jomsti.v2i1.602>
- Anonim. 1961. *Pedoman untuk Melaksanakan Penderitaan Rakyat* (Jilid I). Surabaya: Penerbit Permata.
- Dahm, Bernhard. 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Danujaya, Budiarto. 1992. *Hari-hari yang Paling Riu (1962–1965)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farram, Steven. 2014. “Ganyang! Indonesian Populas Songs from the Confrontation Era, 1963–1966.” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 170(1): 1–24.
<https://doi.org/10.1163/22134379-17001002>
- Fauzanafi, Muhammad Zamzam. 2024. “Dari Ngak-ngik-ngok, ke Cengeng, lalu Ambyar: Politik Afektif Musik Indonesia.” *UMBARA Indonesian Journal of Anthropology* 9(2): 135–147.
<https://doi.org/10.24198/umbara.v9i2.59875>
- Hidayat, Arief. 2018. “Sejarah dan Perkembangan Musik Rock di Indonesia tahun 1970–1990.” *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah* 1(1): 12–18.
<https://doi.org/10.37058/bjpsis.v1i1.847>
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lubis, Firman. 2008. *Jakarta 1960-an: Kenang-kenangan Semasa Mahasiswa*. Jakarta: Masup.
- Mulyadi, Muhammad. 2009. *Industri Musik Indonesia, Suatu Sejarah*. Bekasi: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Pratiwi, Ayu, dan Nasution. 2014. “Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959–1967.” *Avatara e-journal Pendidikan Sejarah* 2(3): 334–345.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8864>
- Piper, Susan, dan Sawung Jabo. 1987. “Musik Indonesia dari 1950-an hingga 1980-an.” *Prisma*, Tahun XVI, No. 5, Mei.
- Pamoedji, D. J. 1985. “Pertunjukkan Musik Bersama Rhoma Irama dan Ahmad Albar.” *Kompas*, 21 Desember.
- Sasangkko, Michael Hari. 2006. “Perubahan Wujud Penayangan dan Makna Musik Dangdut di TPI dan Indosiar 1994–2004.” Disertasi, Program Studi Pengkajian Seni Rupa, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sasongko, A. Tjahjo, dan Nug Katjasungkana. 1991. “Pasang Surut Musik Rock di Indonesia.” *Prisma*, No. 10, Oktober.
- Sedyawati, Edi, dan Sapardi Djoko Damono, eds. 1991. *Musik Pop Indonesia: Suatu Kebebalan Sang Mengapa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekarno. 1961. *Dari Proklamasi sampai Resopim*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Suhana, Ais. 2014. *Kisah dari Hati: Koes Plus, Tonggak Industri Musik Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Sunarti, Linda. 2014. "Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957–1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama." *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 2(1): 65–80. <https://doi.org/10.2121/susurgalur.v2i1.75>
- Theodore, K. S. 1982. "Kaset Rock Mulai Banyak Dicari." *Kompas*, 6 Juni.
- Wardaya, Baskara T., ed. 2001. *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.